

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, pendidikan tinggi diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya pada pendidikan tinggi, dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar sementara mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Telkom University atau biasa disebut Tel-U merupakan salahsatu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia yang merupakan penggabungan dari empat perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu Institut Teknologi Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Design Indonesia Telkom (STISI Telkom) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto pada tanggal 24 Maret 1994. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 309/E/0/2013 menyatakan diresmikannya Universitas Telkom (*Telkom University*) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA di *Telkom University Convention Hall*.

Telkom University memiliki visi menjadi perguruan tinggi berkelas dunia (*A World Class University*) yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni berbasis teknologi informasi. Visi *Telkom University* untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia juga di buktikan dengan prestasi yang telah diraih oleh mahasiswanya pada beberapa kompetisi yang diselenggarakan di

tingkat nasional maupun internasional. Pada tanggal 30 Desember 2016, *Telkom University* meraih akreditasi A yang diberikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dalam keputusan NO. 3125/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2019 oleh Kemenristekdikti, *Telkom University* dinobatkan sebagai Perguruan Tinggi Swasta nomor satu di Indonesia, setelah pada tahun 2018 *Telkom University* hanya menempati posisi ke tiga Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. (telkomuniversity.ac.id)

Treck record Telkom University dari Desember 2016 setelah meraih akreditasi A, hingga Agustus 2019 setelah dinobatkan menjadi Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun telah meluluskan mahasiswanya sebanyak 12.733 melalui tiga periode wisuda di tiap tahun nya, data per-tahun kelulusan mahasiswa akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Lulusan *Telkom University*

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah Lulusan	4.565 Orang	5.330 Orang	5.851 Orang

(Sumber : Badan Administrasi Akademik)

Telkom University memiliki tujuh fakultas antarlain Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Teknik Informatika, Fakultas Rekayasa Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Fakultas Industri Kreatif, serta Fakultas Ilmu Terapan (smb.telkomuniversity.ac.id) yang berada dalam satu lingkup pendidikan yang berada di kawasan Bandung Technoplex tepatnya di jalan Telekomunikasi No. 1 Terusan Buah Batu Bandung. Yang dulunya kawasan tersebut merupakan lokasi stasiun radio kedua di Indonesia milik pemerintah Kolonial Belanda. Dalam penelitian ini, penulis memilih satu fakultas dari beberapa fakultas yang ada di *Telkom University* sebagai objek penelitian, fakultas yang dipilih adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau sering disebut FEB.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis berawal sejak tahun 1990 dengan nama MBA-Bandung yang merupakan penyelenggara program *Magister in Business Administration* pertama di Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1994 MBA-Bandung berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) dan mengubah program MBA-nya menjadi program Magister Manajemen. Pada tahun 1997 STMB menyelenggarakan program S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika kemudian pada tahun 2004 STMB mengubah nama menjadi STMB Telkom, selanjutnya pada tahun 2008 STMB Telkom bertransformasi menjadi Institut Manajemen Telkom atau yang sering disebut IM Telkom dan terjadi penambahan program studi S1 lainnya yaitu S1 Ilmu Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Bisnis, dan D3 Pemasaran, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan saat ini setelah terbentuknya *Telkom University* maka resmi terbentuklah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki tiga program studi yaitu S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika serta S1 Akuntansi. (seb.telkomuniversity.ac.id)

Prodi Strata-1 Akuntansi yang resmi dibuka pada tahun akademik 2007/2008 dikarenakan proses perubahan status Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom menjadi Institut Manajemen Telkom berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/D/08 pada tanggal 28 Maret 2008. Pada tanggal 10 Oktober 2017 Program Studi S1 Akuntansi mendapatkan Akreditasi A dari BAN PT dengan Nomor 3727/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi dan masa berlaku hasil akreditasi program sarjana di Perguruan Tinggi. Prodi S1 Akuntansi *Telkom University* memiliki visi menjadi program studi berkelas dunia dalam bidang Akuntansi berdasarkan pengembangan secara kreatif terhadap ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2018 (bas.telkomuniversity.ac.id). Serta memiliki misi yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang akuntansi berbasis teknologi dan komunikasi (TIK) serta memiliki jiwa wirausaha.

2. Menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi untuk membekali kompetensi tambahan yang relevan dengan bidang akuntansi dan TIK.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang akuntansi dengan mengakomodir konten teknologi informasi dan komunikasi, serta melibatkan mahasiswa dalam tim peneliti.
4. melakukan publikasi hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa yang ber-reputasi nasional maupun internasional.
5. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan mahasiswa.
6. Melaksanakan penjaminan mutu pelayanan pendidikan dan sistem informasi berstandar internasional.

Kompetensi yang dihasilkan dari program studi akuntansi yang mampu menyusun laporan keuangan perusahaan komersial dan sektor publik (organisasi pemerintah dan LSM) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

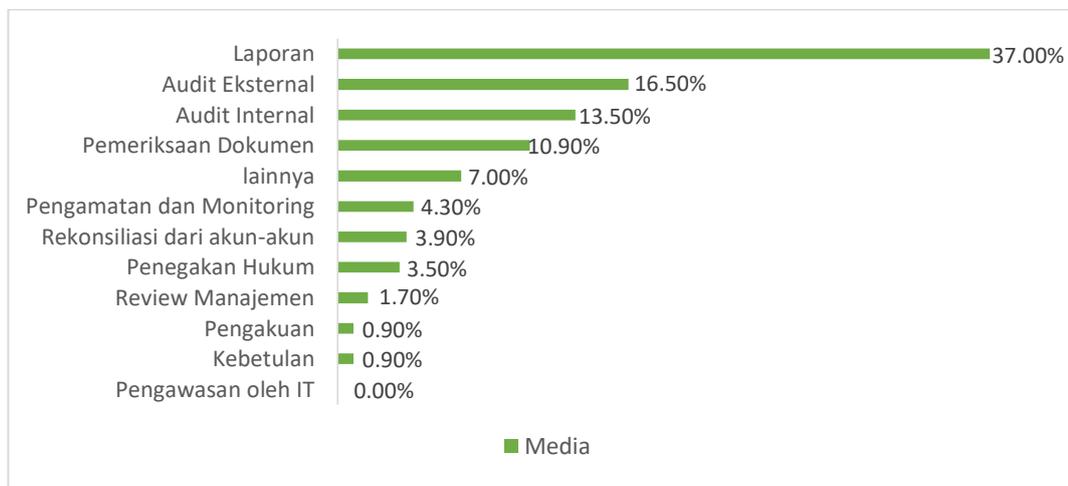
Dari pencapaian serta visi dan misi Prodi S1 Akuntansi yang dipaparkan sebelumnya, maka disini penulis akan membahas mengenai alumni S1 Akuntansi *Telkom University* yaitu adalah mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi serta telah dinyatakan lulus dalam sidang akademik yang selanjutnya disebut sebagai Sarjana. Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan objek yaitu alumni S1 Akuntansi yang lulus pada tahun 2017 sampai 2019 yang di wisuda dalam tiga periode dalam setiap tahunnya, periode pertama dilaksanakan pada bulan November, lalu periode kedua dilaksanakan pada bulan Maret, dan periode ketiga dilakukan pada bulan Agustus. Dengan jumlah dari setiap lulusan yang telah diwisuda pada tahun 2017, 2018, dan 2019 adalah tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Lulusan S1 Akuntansi Telkom University

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah Lulusan	219 Orang	234 Orang	304 Orang

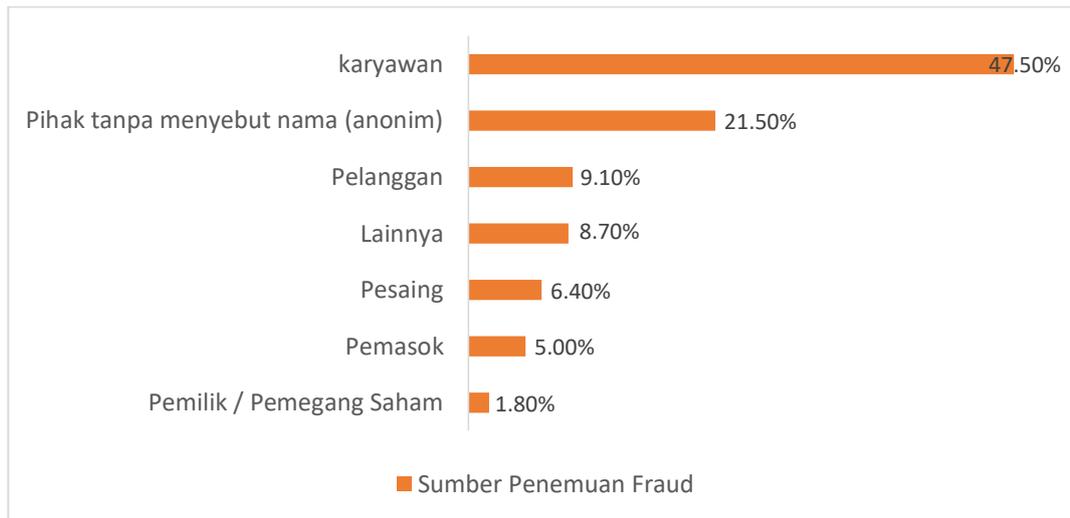
(Sumber : Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Tel-U)

Kenapa penulis menggunakan sample alumni S1 Akuntansi Telkom University yang lulus pada tahun 2017-2019 adalah karna objek tersebut masih terjangkau oleh penulis, hal tersebut menjadi pertimbangan penyebaran kuisioner yang dilakukan penulis agar dapat tersampaikan dengan tepat dan membutuhkan waktu yang sebetar dalam penyebaran kuisioner nya. Namun alasan utama penulis menggunakan objek tersebut adalah dikarenakan Alumni S1 Akuntansi Telkom University yang lulus pada tahun 2017-2019 hampir seluruhnya sudah berstatus sebagai karyawan di suatu perusahaan, Dalam penelitian yang dilakukan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) yang berjudul “Survai Fraud Indonesia” (2016) menyebutkan bahwa laporan merupakan media terbesar ditemukannya *fraud* atau kecurangan dan sumber dari laporan tersebut adalah dari karyawan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut sama denga RTTN (*Report to The Nations*) yang dipublikasikan oleh ACFE yang menyebutkan bahwa sumber utama dari ditemukannya *fraud* atau kecurangan adalah karyawan. Seperti dibuktikan dalam grafik di bawan ini.



(Sumber : ACFE “Survai Fraud Indonesia 2016”)

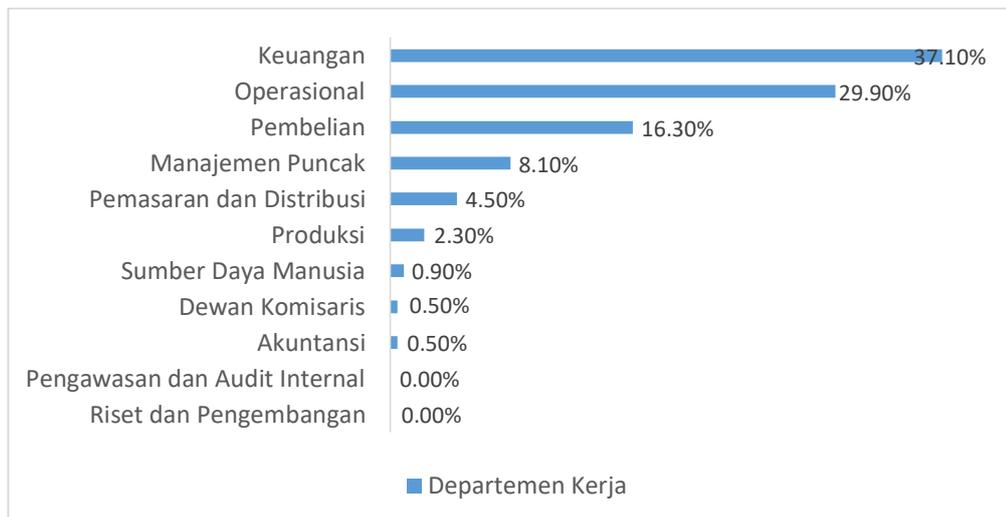
Gambar 1.1
Media Ditemukannya Fraud



(Sumber : ACFE “Survai Fraud Indonesia 2016”)

Gambar 1.2

Sumber Penemuan *Fraud*



(Sumber : ACFE “Survai Fraud Indonesia 2016”)

Gambar 1.3

Bagian Tempat Pelaku *Fraud* Bekerja

Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh ACFE juga ditemukan bahwa departemen atau bagian keuangan merupakan tempat utama terjadinya *fraud* di suatu perusahaan, menurut ACFE (Survai *Fraud* Indonesia, 2016) hal tersebut

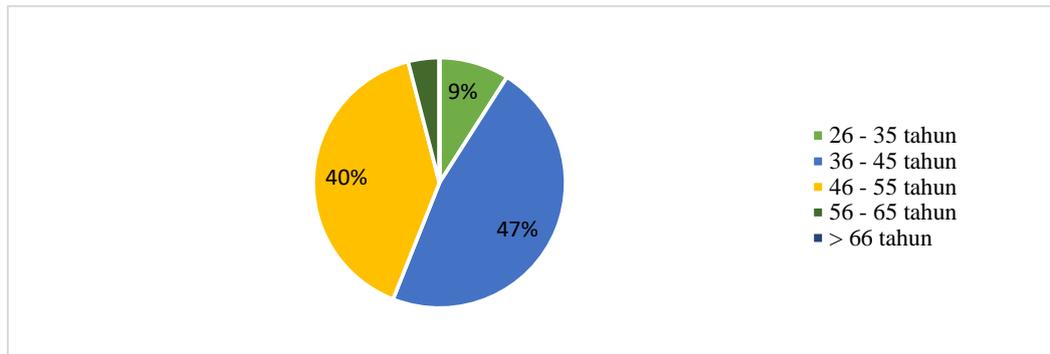
wajar terjadi dikarenakan departemen keuangan merupakan sumber dana yang sering kali menjadi motivasi atau tekanan bagi seseorang untuk melakukan *fraud* atau kecurangan apabila terdapat peluang yang tinggi.

Kemudian dari penjabaran diatas baik mengenai *Telkom University*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi serta penjelasan mengenai alumni maka dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian yaitu Alumni S1 Akuntansi *Telkom University* yang Lulus Pada Tahun 2017 sampai 2019. Jika dilihat dari tahun kelulusan mahasiswa yang menjadi objek penelitian, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 adalah lulusan pertama S1 Akuntansi *Telkom University* dikarenakan dihitung dari tahun berdiri *Telkom University* yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 adalah *fresh graduate* dari prodi S1 Akuntansi *Telkom University* yang telah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan *ijazah* dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kasus kecurangan dalam dunia akuntansi telah menyebabkan lunturnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai independensi dan profesionalitas. Menurut Sofyanty (2019:43) kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan karena adanya kesempatan, tekanan, konfrontasi bahkan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Maraknya kasus kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, bahkan korupsi menjadi kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Sugianto dkk (2011) menyatakan bahwa penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi yang menyesatkan dan tidak benar untuk meraup keuntungan pribadi, telah menimbulkan kerugian. Kecurangan dalam laporan keuangan juga menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terutama para investor, kreditur, dan pemerintah. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh ACFE (*Survei Fraud Indonesia*, 2016) pada tabel 1.3 mengenai bagian tempat pelaku bekerja adalah departemen atau bagian keuangan yang dimana disitulah para *accounting* berada. Dengan rata-rata usia pelaku *fraud* berada pada rentan 36-45 tahun yang

menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak. ACFE (Survei *Fraud* Indonesia, 2016)

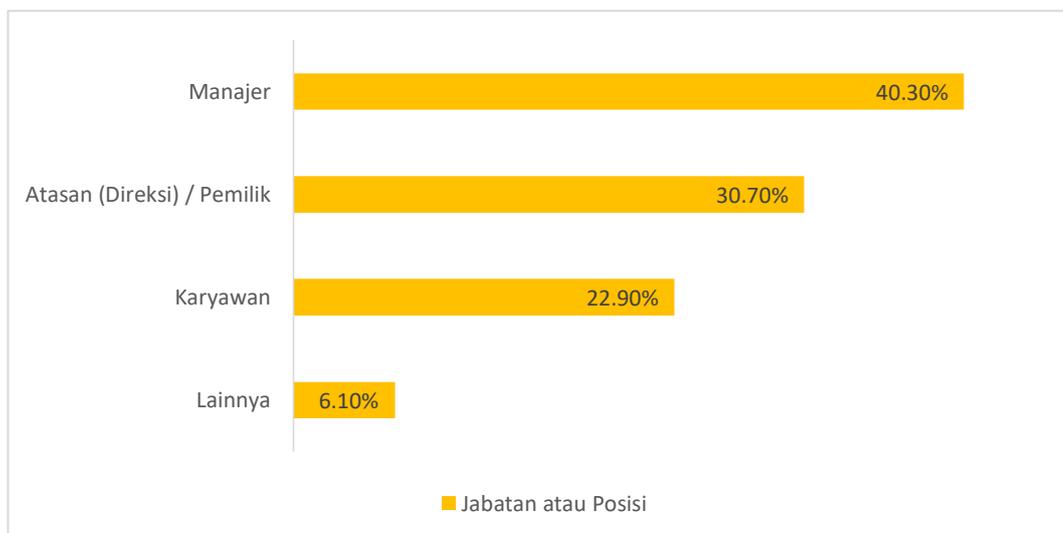


(Sumber : ACFE “Survei *Fraud* Indonesia 2016”)

Gambar 1.4

Usia Rata-rata Pelaku *Fraud*

Hal tersebut terbukti bahwa para pelaku *fraud* sedang berada pada posisi menengah ke atas pada jenjang karir nya, hal ini tertulis dalam penelitian ACFE (Survei *Fraud* Indonesia, 2016) yaitu manajer merupakan jabatan yang paling banyak melakukan *fraud*, ha ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di indonesia bahwa tingkan *middle manajemen* yang paling banyak melakukan *fraud*.



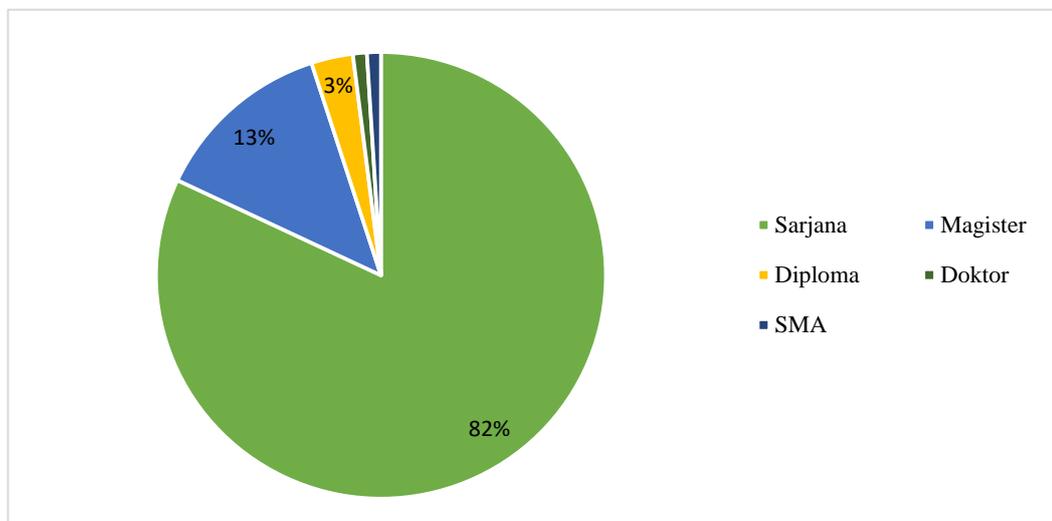
(Sumber : ACFE “Survei *Fraud* Indonesia 2016”)

Gambar 1.5

Jabatan Pelaku *Fraud*

Fenomena tersebut dapat menggambarkan terjadinya penyimpangan yang ada pada lingkungan pekerjaan para akuntan khususnya di Indonesia yang tergambar oleh kecurangan tertinggi berada pada bidang keuangan di suatu perusahaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di bidang terkait.

Pada survey yang dilakukan ACFE (Survei *Fraud* Indonesia, 2016) ditemukan juga bahwa pendidikan pelaku *fraud* di Indonesia yang pertama di tempati oleh tingkat pendidikan Sarjana sebesar 82% kemudian di susul oleh Magister sebesar 13% dan Diploma sebesar 3% serta tingkat pendidikan SMA dan Doktor dengan bobot masing-masing 1%.

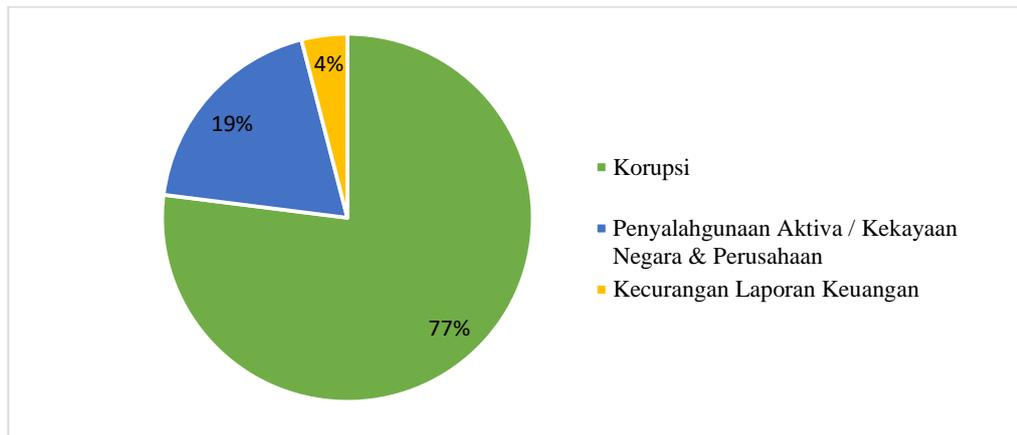


(Sumber : ACFE “Survei *Fraud* Indonesia 2016”)

Gambar 1.6

Pendidikan Pelaku *Fraud*

Berdasarkan survei yang dilakukan ACFE (Survei *Fraud* Indonesia, 2016), responden menilai bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia dengan presentase sebesar 77% dan penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara/ perusahaan sebesar 19% serta kecurangan laporan keuangan sebesar 4%.

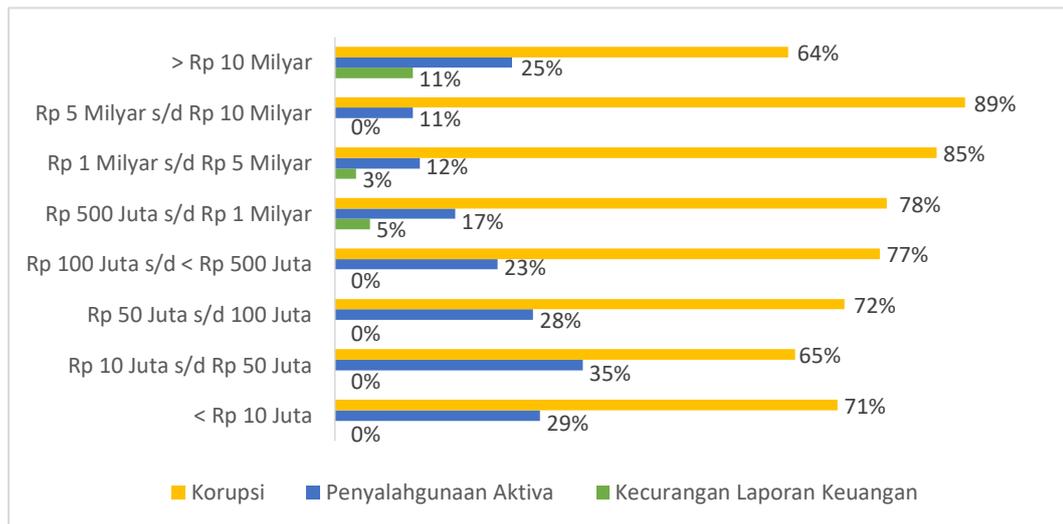


(Sumber : ACFE “Survai Fraud Indonesia 2016”)

Gambar 1.7

Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia

Dengan kerugian dari masing-masing *fraud* yang terjadi adalah sangat material dan di jelaskan pada gambar di bawah ini.



(Sumber : ACFE “Survai Fraud Indonesia 2016”)

Gambar 1.8

Kerugian Akibat Fraud Berdasarkan Jenis Fraud

Hal tersebut di perkuat oleh informasi pelaku korupsi di Indonesia selama tahun 2003 sampai dengan bulan mei 2016 yang datanya diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam ACFE (Survai *Fraud* Indonesia, 2016)

yaitu sebanyak 2.520 informasi putusan dengan total kerugian langsung akibat korupsi adalah senilai Rp 17.808.972.138.738.

Akibat sering terjadinya pelanggaran dalam akuntansi menggambarkan perubahan profesionalisme dan pelanggaran etika akuntan. Kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia salahsatunya adalah kasus yang terjadi pada Grup Bakrie di PT Bank Capital Indonesia TBK. Dikutip dari Sugiyanto dkk (2011) dalam Kareshastuti (2014:2) Sebanyak tujuh emiten Grup Bakrie di dalam laporan keuangan per 31 Maret 2010 mengklaim menyimpan dana sebesar Rp. 9,07 triliun. Tetapi Bank Capital Indonesia menyebutkan jumlah dana pihak ketiga di bank tersebut adalah sebesar Rp. 2,69 triliun saja. Hampir semua laporan keuangan unit usaha Bakrie diaudit oleh Mazars Moores Rowland Indonesia. Kasus tersebut terungkap karena adanya *whistleblower* dari analisis atau pelaku pasar modal yang melihat adanya kejanggalan dan mengungkapkannya kepada publik. Yang pada akhirnya Bursa Efek Indonesia (BEI) menghukum empat emiten Grup Bakrie. Sanksi yang diberikan yaitu denda masing-masing senilai Rp. 500 juta yang diberikan atas perilaku pelanggaran akuntansi atas pendapatan dana simpanan mereka di Bank Capital Indonesia.

Kasus pelanggaran akuntansi di Indonesia yang lainnya adalah dalam Wirawinada (2011) dalam Pangesti (2017) menjelaskan kasus yang terjadi pada PT. Asian Agri Group (AAG), yaitu salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan merupakan induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas. Bermula dari Vincentius Amin Sutanto (vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3.1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai *group financial controller* di PT AAG yang mengetahui seluk beluk keuangannya. Perbuatan vincent ini diketahui oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelarian Vincent berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, pada tanggal 1 Desember 2006 Vincent datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salahsatu

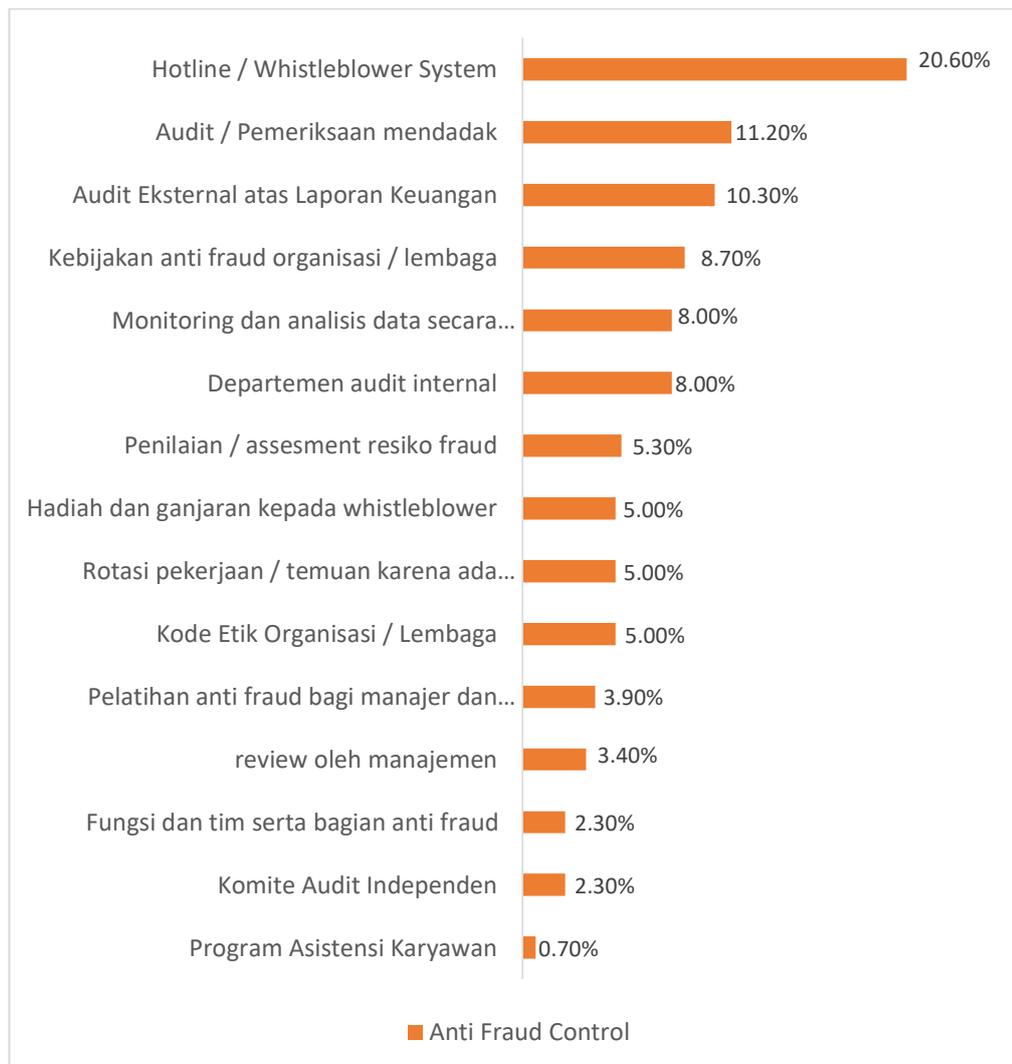
dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul *AAA-Cross Border tax Planning (Under Pricing of Export Sales)*, yang disusun pada tahun 2002. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak di antara lain pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat RP 2.62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1.5 triliun. Mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Melalui modus ini, AAG diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2.6 triliun. Perhitungan SPT AAG yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan negara hingga Rp 1.3 triliun.

Dari kedua kasus yang telah dipaparkan di atas yaitu kasus Grup Bakrie di PT Bank Capital Indonesia Tbk dan kasus PT Asian Agri Group terdapat kesamaan yaitu pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang masih bersangkutan dengan perusahaan tersebut, pada kasus Grup Bakrie sendiri pelaporan kecurangan dilakukan oleh analisis atau pelaku pasar modal yang mengungkapkannya kepada publik atas kecurangan yang dilakukan, sedangkan dalam kasus PT Asian Agri Group pengungkapan kecurangan dilakukan oleh Vincentius Amin Sutanto selaku *group financial controller* di PT AAG yang kemudian melaporkan temuan kecurangan perusahaan kepada KPK. Kedua pihak yang melaporkan kecurangan perusahaan baik kepada publik maupun kepada instansi penegak hukum di Indonesia menggambarkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan *whistleblowing*.

Salahsatu cara pengungkapan kecurangan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akunting adalah dengan cara yaitu *whistleblowing*. Menurut Kareshastuti (2014:2) *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi baik yang aktif maupun non-aktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal, atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Di Indonesia, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System (WBS)* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) pada 10 November 2008 yang menyatakan bahwa peraturan tersebut mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai. Menurut Tuanakotta (2010) dalam Sofyanti (2019:43) menjadi *whistleblower* merupakan tindakan yang beresiko karena terdapat ancaman fisik dan psikis baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak tertentu yang mengakibatkan *whistleblower* merasa takut dan dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu kasus. Hal tersebut dialami oleh Komisaris Jendral Susno Duadji, dimana ia justru dijadikan tersangka atas pasal pencemaran nama baik dan pelanggaran disiplin sebagai anggota Polri. Atas kasus tersebut pemerintah kemudian bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menjamin perlindungan keamanan bagi seorang *whistleblower*. Dikutip dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2011) menyebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* ada di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kemudian dikeluarkan nya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Maka dari itu pelapor kecurangan dengan melakukan *whistleblowing* merupakan cara yang efektif karena dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui kecurangan yang terjadi di organisasi serta sudah ada pedoman sistem pelaporan pelanggaran nya, namun dalam proses pelaksanaan nya terdapat resiko yang bersifat mengancam *whistleblower* baik ancaman fisik maupun psikis.

Alasan diatas diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh ACFE (Survei *Fraud* Indonesia, 2016) yang menyatakan bahwa pencegahan fraud yang paling efektif adalah melalui mekanisme *whistleblowing hotline*. Namun sampai saat ini media ini belum banyak digunakan oleh perusahaan dan juga pada perusahaan yang telah menerapkan *whistleblowing hotline* belum merasakan efektivitasnya.



(Sumber : ACFE “Survai Fraud Indonesia 2016”)

Gambar 1.9

Anti Fraud Control

Menurut Ajzen (1985) dalam Setiawati (2016:261) selaku penemu *theory of planned behavior*, jenis perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang dapat diprediksi dengan tingkat akurat yang tinggi dari sikap seseorang terhadap perilaku tersebut, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori tersebut dijadikan dasar teori oleh penulis dan dijadikan acuan untuk memprediksi perilaku seseorang apakah akan melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan,

memperkirakan dampak dari niat perilaku tersebut, serta membuat strategi untuk mengubah perilaku jika itu dianggap tidak sesuai.

Dalam Sofyanty (2019) Komitmen organisasi menjadi penting khususnya bagi organisasi dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, serta untuk mengukur sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk memelihara keanggotaannya terhadap organisasi dengan begitu dapat diketahui sejauh mana komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya. Variabel komitmen organisasi merepresentasikan komponen norma subyektif pada *theory of planned behavior*. Menurut Porter (1974) dalam Setiawati (2016:262) komitmen organisasi merupakan kekuatan karyawan sesuai dengan bagaimana karyawan terlibat dalam suatu organisasi, keyakinan yang kuat pada nilai dan tujuan akhir dari suatu organisasi, serta kemauan untuk berusaha yang baik atas nama organisasi. Streers dan Porter dalam Yusuf (2018) menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya komitmen organisasi, yaitu:

1. Karakteristik pribadi, yaitu kondisi potensi, kapasitas kemampuan, dan kemauan seseorang karyawan sesuai kebutuhan dunia kerja. Karakteristik pribadi ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, motivasi dan nilai-nilai personal.
2. Karakteristik pekerjaan, yaitu kondisi nyata berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, hal ini meliputi tantangan pekerjaan, kesempatan untuk berinteraksi sosial, identitas tugas, dan umpan balik.
3. Karakteristik organisasi, yaitu desentralisasi dan otonomi tanggung jawab, partisipasi aktif karyawan, hubungan atasan dan bawahan, sifat dan karakteristik pimpinan serta cara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
4. Sifat dan kualitas pengalaman kerja seorang karyawan dengan berbagai aspek di dalamnya dapat mempengaruhi komitmen karyawan.

Maka dari itu komitmen organisasi adalah penilaian penting yang harus dimiliki suatu organisasi untuk menilai apakah karyawan berkomitmen dengan organisasi dan memiliki keberpihakan yang tinggi dengan organisasi tersebut,

semakin banyak karyawan terlibat dalam organisasi dan semakin percaya karyawan terhadap tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen organisasi seorang karyawan terhadap organisasi.

Dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Devy Sofyanty (2019) mengenai pengaruh komitmen organisasi dan iklim organisasi terhadap tindakan *whistleblowing* menunjukkan hasil berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap *whistleblowing*. Yang ini berarti semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan semakin besar kemungkinan karyawan tersebut melakukan tindakan *whistleblowing* jika pada organisasinya terdapat suatu kecurangan yang dianggapnya merugikan organisasi. Penelitian juga dilakukan oleh Sims dan Keenan (1998) serta Msmer-Maguns dan Viswesvaran (2005) dalam Taylor dan Curtis (2010) pada penelitian yang meneliti antara hubungan komitmen organisasi dengan *whistleblowing*. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara komitmen organisasi dengan *whistleblowing*. Serta pada penelitian Poespito (2017) yang berjudul minat pegawai dalam melakukan tindakan *whistleblowing* menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap minat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Setyawati (2015) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Menurut Kareshastuti (2014:5) intensitas moral dapat dikaitkan dengan konsep persepsi kontrol perilaku dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Persepsi kontrol perilaku merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut. Kemudian menurut Setiawati (2016:263) intensitas moral adalah tindakan individu yang dipengaruhi oleh sikap yang melekat dalam dirinya terhadap suatu perilaku, individu akan mengidentifikasi ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku yang akan dilakukan. Menurut penulis, intensitas moral dari setiap individu pasti berbeda, walaupun dihadapkan dengan suatu

permasalahan yang sama, baik dari sikap, pola pikir, dan penyelesaian yang dilakukan akan berbeda tergantung dari pandangan baik atau buruk atas perilaku yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan Luh Putu Setiawati (2016) mengenai profesionalisme, komitmen organisasi, intensitas moral, dan tindakan akuntan melakukan *whistleblowing* menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dari intensitas moral terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Apabila intensitas moral seorang akuntan semakin tinggi maka semakin tinggi pula niat akuntan untuk melakukan *whistleblowing*. Sementara itu dari penelitian Dewi (2008) dalam Karehastutu (2014) yang menguji komponen intensitas moral yaitu konsensus sosial, besaran konsekuensi, dan kedekatan terhadap intensi untuk berperilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen intensitas moral besaran konsekuensi dan konsensus sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensitas berperilaku seseorang. Sedangkan variabel kedekatan tidak mempunyai pengaruh terhadap intensitas berperilaku seseorang.

Merton dan Rossi (1968) dalam Bakrie (2014) mengartikan sosialisasi antisipatif sebagai proses adopsi seseorang terhadap sikap dan keyakinan dari kelompok tertentu sebelum menjadi anggota dari kelompok tersebut. Konsep sosialisasi antisipatif pertamakali muncul dalam literatur manajemen Merton dan Rossi (1968) dalam Elias (2008) yang menyebutkan bahwa sosialisasi antisipatif didefinisikan sebagai proses pengadopsian sikap dan perilaku suatu kelompok tertentu yang dilakukan oleh individu bahkan sebelum mereka bergabung ke dalam kelompok tersebut. Pengadopsian perilaku dari suatu kelompok tertentu yang dilakukan seseorang akan terjadi sepanjang ia berada di dalam kelompok, dari sosialisasi antisipatif yang dilakukan individu dalam kelompok tersebut dapat merubah sikap dan perilaku individu yang akan menyesuaikan dengan kelompoknya. Dari penelitian yang dilakukan Bakrie (2014) tentang analisis komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif serta hubungannya dengan *whistleblowing* menggambarkan hasil pengujian hipotesis bahwa variabel sosialisasi antisipatif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *whistleblowing*. Pada penelitian Jalil (2014) menunjukkan hal yang berbeda dengan penelitian Bakrie, yaitu menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan

dengan tingkat sosialisasi antisipatif responden terhadap tindakan *whistleblowing*. Serta dalam penelitian Ratnasari (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi antisipatif tidak berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* baik dari aspek persepsi maupun niat *whistleblowing*.

Pada penelitian ini penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *whistleblowing* pada akuntan sebagai responden penelitian. Akuntan yang di ambil sebagai objek dalam penelitian ini adalah lulusan S1 akuntansi *Telkom University* yang telah dinyatakan lulus pada tahun 2017 sampai 2019 yang selanjutnya disebut sebagai alumni S1 Akuntansi *Telkom University*. Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis berikan pemaparan nya diatas, maka dengan ini penulis berkesimpulan untuk mneggunakan judul penelitian : **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Intensitas Moral, dan Sosialisasi Antisipatif Terhadap Tindakan *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Alumni S1 Akuntansi *Telkom University* yang Lulus Pada Tahun 2017-2019)”**

1.3 Perumusan Masalah

Maraknya pelanggaran etika dalam dunia akuntansi baik dalam bentuk kecurangan atas laporan keuangan, kecurangan atas pemakaian aset, bahkan tindakan korupsi sudah sangat marak terjadi di Indonesia bahkan di dunia, seolah-olah prilaku tidak beretika tersebut lumrah terjadi di kalangan praktisi di dunia akuntansi. Hal tersebut menjadi perhatian dan ancaman serius terhadap profesi akuntan yang seharusnya memiliki independensi dan etika yang baik dikarenakan output dari akuntan adalah laporan keuangan yang akan digunakan manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan keputusan dan perencanaan suatu organisasi kedepannya. Namun karena semakin umum dan marak nya perilaku pelanggaran etika tersebut terjadi mengakibatkan lunturnya kepercayaan pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terhadap profesi akuntan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan pengguna laporan keuangan dan pihak yang berkepentingan lainnya

adalah dengan melakukan tindakan *whistleblowing* atau pengungkapan pelanggaran. Namun dalam implementasinya terdapat banyak kendala dalam tindakan *whistleblowing* dikarenakan ancaman dan resiko yang harus dihadapi *whistleblower* pada saat akan melakukan tindakan pengungkapan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian mengenai permasalahan etika guna menganalisis pengaruh komitmen organisasi, intensitas moral, dan sosialisasi antisipatif terhadap tindakan *whistleblowing* yang bisa menggambarkan faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*. Penelitian ini mengandalkan data primer yang didapat dari penyebaran kuisisioner yang nantinya akan di isi oleh alumni S1 Akuntansi, yang nantinya akan diketahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi, intensitas moral, dan sosialisasi antisipatif akunting terhadap tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan perumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *whistleblowing* yang telah di jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana komitmen organisasi, intensitas moral, sosialisasi antisipatif dan tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University* ?
2. Bagaimana komitmen organisasi, intensitas moral, dan sosialisasi antisipatif berpengaruh secara simultan terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University* ?
3. Bagaimana komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University*?
4. Bagaimana intensitas moral berpengaruh secara parsial terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University*?
5. Bagaimana sosialisasi antisipatif berpengaruh secara parsial terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana komitmen organisasi, intensitas moral, sosialisasi antisipatif, dan tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 akuntansi *Telkom University*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, intensitas moral, dan sosialisasi antisipatif secara simultan terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University* .
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi secara parsial terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University*.
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas moral secara parsial terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University*.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi antisipatif secara parsial terhadap tindakan *whistleblowing* pada alumni S1 Akuntansi *Telkom University*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi para akademisi, dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Ilmu Akuntansi khususnya dalam bidang audit.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan rujukan dalam penelitian tentang persepsi akuntan dengan fokus pada niat melakukan tindakan *whistleblowing*, serta diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang *whistleblowing*. Penulis selanjutnya disarankan untuk mencoba variabel independen lainnya seperti komitmen profesional, tingkat keseriusan kecurangan, profesionalisme, serta variabel lain nya guna mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi akuntan atau karyawan diharapkan memberi wawasan, ilmu dan pengetahuan mengenai tindakan *whistleblowing* yang dapat menjadi alat pelaporan kecurangan yang efektif dan efisien dalam pengungkapan kecurangan yang merugikan perusahaan ataupun merugikan karyawan sendiri.

2. Bagi perusahaan diharapkan memberikan pendidikan dan pelatihan moral kepada karyawan baik melalui pelatihan anti kecurangan dan pengenalan *whistleblowing hotline*. Dengan peningkatan moral serta pengenalan kepada *whistleblowing hotline* tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Tugas akhir ini ditulis terbagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang sesuai dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis tentang pedoman penulisan tugas akhir nomor KD.14.1/AKD9/EB-DEK2019 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2019, tujuan penulisan tugas akhir terbagi menjadi lima bab adalah guna memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan memberi penjelasan mengenai permasalahan serta pembahasan dari penelitiann tersebut. Adapun deskripsi dari lima bab tersebut antara lain sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisi aspek teoritis dan aspek praktis, ruang lingkup penelitian yang berisi penjelasan mengenai variabel dependen dan independen, lokasi dan objek penelitian serta waktu dan periode penelitian, dan terahir adalah sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan teori-teori dasar yang memperkuat dan menjadi dasar penelitian serta kerangka penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan hipotesis penelitian serta refrensi dari penelitian terdahulu.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai metode penelitian yang dilakukan. Isi dari bab ini antarlain adalah karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas atau *trustworthiness* serta yang terakhir adalah teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan dari penelitian yang dilakukan serta berisi pemaparan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi pemaparan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan beserta saran bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai topik *whistleblowing*.